

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

6.1.1. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan MBKM di UWKS berjalan kurang optimal karena beberapa aktifitas berjalan dengan lancar dan ada yang tidak

Tabel 5.1 Simpulan dari Proses Implementasi

Tahap	Aktifitas	Simpulan
Perencanaan	SK Rektor	Optimal
	Kurikulum	Optimal
Pelaksanaan	Sosialisasi Program	Optimal
	Kerjasama dengan mitra	Tidak Optimal
	Pelaksanaan itu sendiri	Tidak Optimal

Pada tahap perencanaan, BP3 menelurkan SK Rektor sebagai panduan serta fondasi legal dan juga mensosialisasikan kurikulum perguruan tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya, prodi melakukan sosialisasi, kerjasama dengan mitra, dan pelaksanaan itu sendiri.

6.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kemudian, dalam proses implementasiya ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor pendukung yang didapatkan adalah adanya dukungan penuh dari universitas, sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan persepsi antara unit birokratik atas yakni BP3 dengan prodi selaku unit birokratik bawahnya.

6.2. Saran

Ketika memilih topik penelitian ini, penulis merasa bahwa studi implementasi kebijakan masih agak diremehkan dalam ilmu politik di Indonesia. Hal ini tak lepas dari sikap *underestimate* beberapa sivitas akademika yang beranggapan studi ini terbilang mudah, apalagi secara *de facto* literatur studi implementasi kebijakan mulai mendapat banyak perhatian pada 1970-an.

Apabila melihat politik dari paradigma institusionalisme dan kelembagaan baru, studi implementasi kebijakan publik merupakan ujung tombak utama dari paradigma ini. Jadi, penulis berharap prodi Ilmu Politik memberikan perhatian yang sama pada studi ini.